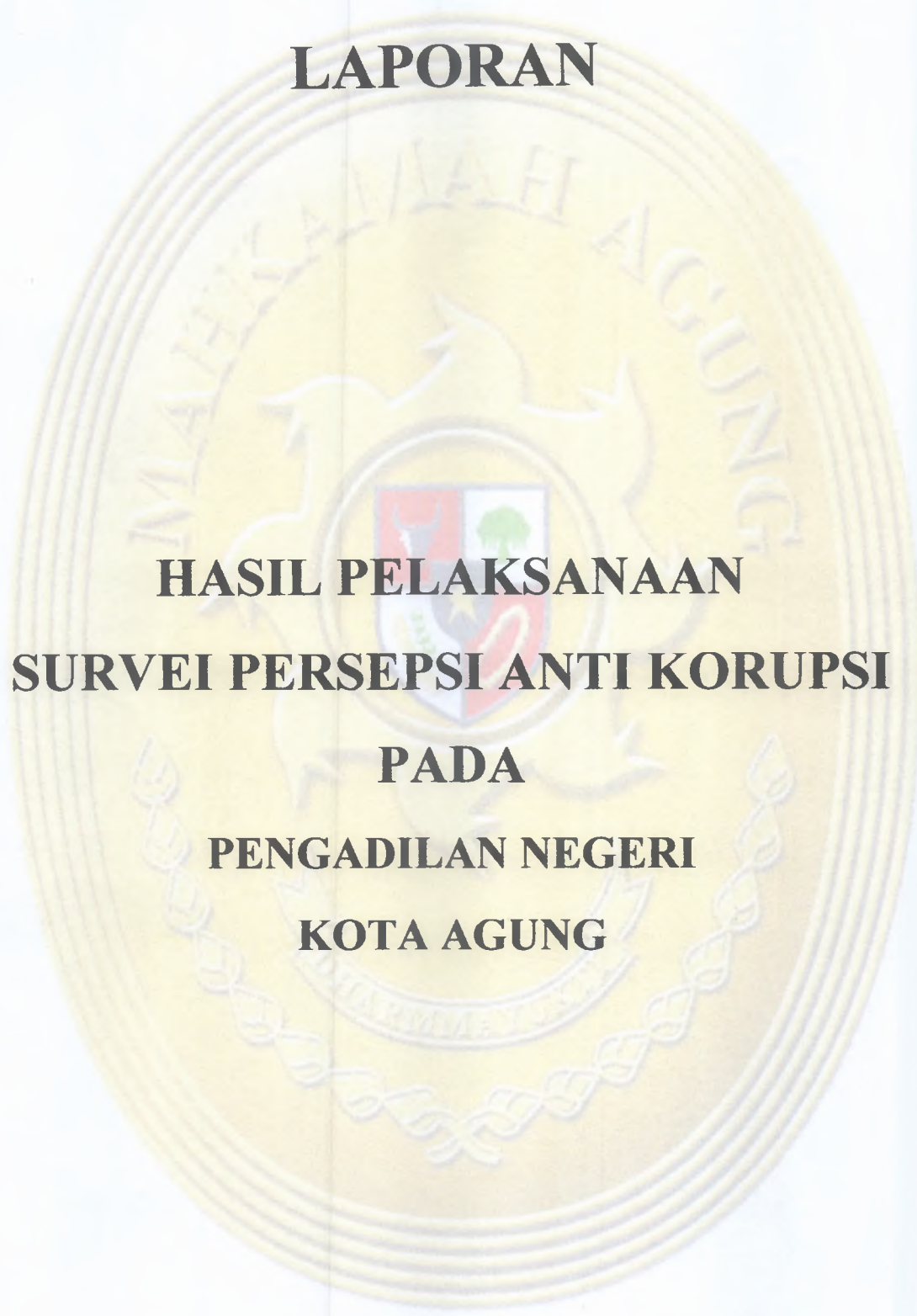


LAPORAN



**HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI
KOTA AGUNG**

TRIWULAN II

TAHUN 2023

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Maksud Dan Tujuan | 1 |
| 1.3. Landasan Hukum | 1 |
| 1.4. Rencana Kerja | 2 |
| BAB II | 4 |
| METODOLOGI | 4 |
| 2.1. Metode Penelitian | 4 |
| 2.2. Populasi Dan Sampel..... | 4 |
| 2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis | 4 |
| 2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control..... | 4 |
| 2.5. Teknik Analisis Data | 5 |
| 2.6. Tahapan pelaksanaan | 6 |
| BAB III | 8 |
| INDEKS PERSEPSI KORUPSI | 8 |
| 3.1. Profil responden | 8 |
| 3.2. Indeks persepsi anti korupsi per indikator..... | 9 |
| 3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan | 20 |
| BAB IV | 24 |
| PENUTUP | 24 |
| 4.1. Kesimpulan..... | 24 |
| 4.2. Rekomendasi | 24 |
| | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 26 |

DAFTAR TABEL

| <i>No. Tabel</i> | | <i>Halaman</i> |
|------------------|---|----------------|
| 1. | Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Anti Korupsi | 6 |
| 2. | Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan..... | 7 |
| 3. | Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan | 10 |
| 4. | Indeks pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan | 11 |
| 5. | Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia | 12 |
| 6. | Indeks pada Indikator Informasi Tarif/Biaya | 13 |
| 7. | Indeks pada Indikator Biaya Tambahan | 14 |
| 8. | Indeks pada Indikator Hadiah | 15 |
| 9. | Indeks pada Indikator Bukti Transaksi Pembayaran | 16 |
| 10. | Indeks pada Indikator Percaloan | 17 |
| 11. | Indeks pada Indikator Praktek KKN..... | 18 |
| 12. | Indeks pada Indikator Mengurus Perkara | 19 |
| 13. | Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Kota Agung | 20 |
| 14. | Nilai Rata-Rata Indikator Persepsi Anti Korupsi (IPAK)..... | 22 |

DAFTAR GAMBAR

| <i>No.</i> | <i>Gambar</i> | <i>Halaman</i> |
|------------|---|----------------|
| 1. | Model Alur Penyusunan Survei IPAK Menuju Zona Integritas | 6 |
| 2. | Responden Menurut Karakteristik Usia Responden..... | 8 |
| 3. | Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin Responden..... | 8 |
| 4. | Responden Menurut Karakteristi Tingkat pendidikan responden | 9 |
| 5. | Responden Menurut Karakteristik Jenis Pekerjaan Responden | 9 |
| 6. | Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan..... | 10 |
| 7. | Indeks pada Penyalahgunaan Jabatan | 11 |
| 8. | Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia | 12 |
| 9. | Indeks pada Indikator Informasi Tarif/Biaya | 13 |
| 10. | Tabel Indeks Biaya Tambahan | 14 |
| 11. | Indeks pada Indikator Hadiah | 15 |
| 12. | Indeks pada Indikator Bukti Transaksi Pembayaran | 16 |
| 13. | Indeks pada Indikator Percaloan | 17 |
| 14. | Indeks pada Indikator Praktek KKN | 18 |
| 15. | Indeks pada Indikator Mengurus Perkara | 19 |
| 16. | Nilai Publikasi Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)..... | 23 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner pada Aplikasi
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

Pengukuran/survei indeks persepsi anti korupsi (IPAK) Triwulan II Tahun 2023 di Pengadilan Negeri Kota Agung ini dilaksanakan pada tanggal **1 April 2023 sampai 30 Juni 2023**.

1.4.3. Metode Survei

Data pada penelitian ini diambil dengan instrumen berupa kuesioner dengan jawaban terbuka. Setiap Responden mengisi kuisisioner melalui aplikasi SiSuper dengan menggunakan media handphone smart phone atau pun dengan menggunakan perangkat komputer yang terhubung dengan internet.

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Kota Agung.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui aplikasi kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap

muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 3 bulan. Selanjutnya data dikalkulasi oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan dengan memanfaatkan hasil perhitungan dari aplikasi SiSuper.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPAK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. *Kedua*, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi anti korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi anti korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Gambar 1
Model Alur Penyusunan Survei IPAK Menuju Zona Integritas



Tabel 1
Ruang Lingkup Survei Indeks Presepsi Anti Korupsi

| No | Ruang lingkup |
|----|-------------------------|
| 1 | Manipulasi Peraturan |
| 2 | Penyalahgunaan Jabatan |
| 3 | Menjual Pengaruh |
| 4 | Transparansi Biaya |
| 5 | Transaksi Rahasia |
| 6 | Biaya Tambahan |
| 7 | Hadiah |
| 8 | Transparansi Pembayaran |
| 9 | Percaloan |
| 10 | Perbuatan Curang |

Tabel 2

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

| Nilai Persepsi | Nilai Interval (NI) | Nilai Interval Konversi (NIK) | Mutu Pelayanan (x) | Kinerja Unit Pelayanan (y) |
|----------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1 | 3,5324 - 4,0000 | 88,31 – 100,00 | A | Bersih dari korupsi |
| 2 | 3,0644 - 3,5320 | 76,61 – 88,30 | B | Cukup bersih dari korupsi |
| 3 | 2,6000 - 3,0640 | 65,00 – 75,60 | C | Kurang bersih dari korupsi |
| 4 | 1,0000 - 2,5996 | 25,00 – 64,99 | D | Tidak bersih dari korupsi |

BAB III

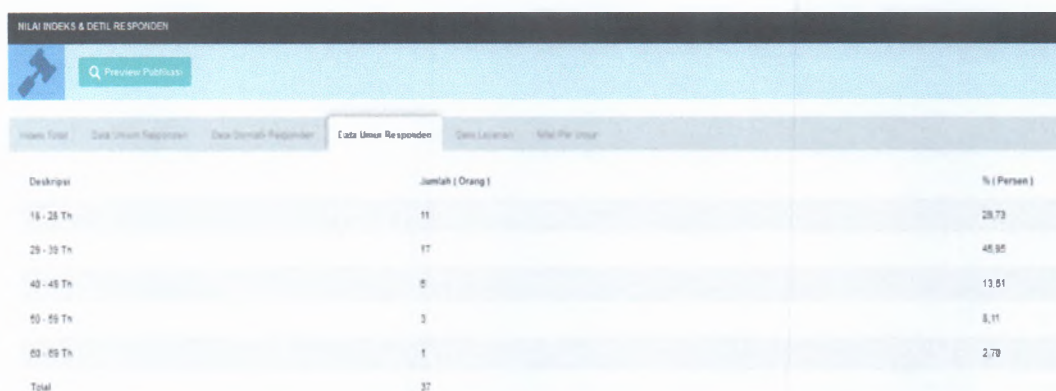
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil responden

3.1.1. Kelompok usia responden

Mayoritas responden ini berusia 29-39 tahun dengan jumlah 17 orang dari total 37 responden (45,95 %).

Gambar 2
Responden Menurut Karakteristik Usia Responden



| Deskripsi | Jumlah (Orang) | % (Persen) |
|------------|----------------|------------|
| 18 - 28 Th | 11 | 29,73 |
| 29 - 39 Th | 17 | 45,95 |
| 40 - 49 Th | 5 | 13,51 |
| 50 - 59 Th | 3 | 8,11 |
| 60 - 69 Th | 1 | 2,70 |
| Total | 37 | |

3.1.2. Kelompok Jenis Kelamin Responden

Mayoritas responden ini berjenis kelamin Laki-laki yang berjumlah 28 orang dari total 37 responden.

Gambar 3
Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin



| | |
|---------------|----------------------|
| JUMLAH | 37 RESPONDEN |
| JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI : 28 ORANG |
| | PEREMPUAN : 9 ORANG |

3.1.3. Tingkat Pendidikan Responden

Mayoritas Pendidikan Terakhir Responden adalah SMU yang berjumlah 18 orang dari total 37 responden.

Gambar 4
Responden Menurut Karakteristik Tingkat Pendidikan

| | | |
|------------|-----------------------------|------------------|
| PENDIDIKAN | Tidak: Belum Sekolah: 1 ORG | Diploma 2: 0 ORG |
| | SD: 5 ORG | Diploma 3: 5 ORG |
| | SMP: 1 ORG | S1: 5 ORG |
| | SMU: 18 ORG | S2: 1 ORG |
| | Diploma 1: 0 ORG | S3: 1 ORG |

3.1.4. Pekerjaan Responden

Mayoritas Pekerjaan Utama Responden adalah Lainnya yang berjumlah 19 orang dari total 37 responden.

Gambar 5
Responden Menurut Karakteristik Jenis Pekerjaan

| | | |
|-----------|-----------------|-----------------------|
| PEKERJAAN | PNS: 2 ORG | SWASTA: 11 ORG |
| | TNI: 0 ORG | WIRSAUSAHA: 1 ORG |
| | POLRI: 2 ORG | TENAGA KONTRAK: 2 ORG |
| | LAINNYA: 19 ORG | |

3.2. Indeks Persepsi Korupsi per Indikator

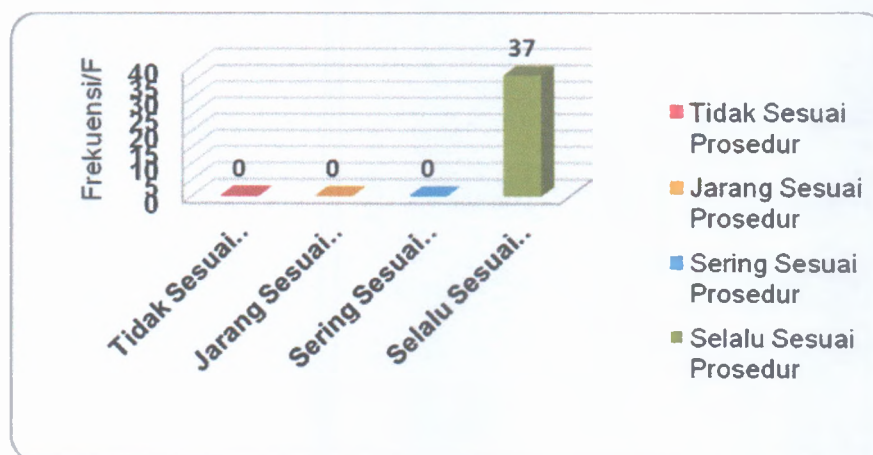
3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar "4,00" berada pada interval skor "3,5324 s/d 4" kategori "A". Dengan demikian layanan pengadilan, pada "Indikator Manipulasi Peraturan" berada pada kategori "Bersih dari korupsi".

Tabel 3
Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan

| No | Jawaban | Skor | Frekuensi | |
|---------------|------------------------|------|-----------|------------|
| | | | F | % |
| 1. | Tidak Sesuai Prosedur | 1 | 0 | 0,00 |
| 2. | Jarang Sesuai Prosedur | 2 | 0 | 0,00 |
| 3. | Sering Sesuai Prosedur | 3 | 0 | 0,00 |
| 4. | Selalu Sesuai Prosedur | 4 | 37 | 100,00 |
| Jumlah | | | 37 | 100 |

Gambar 6
Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan



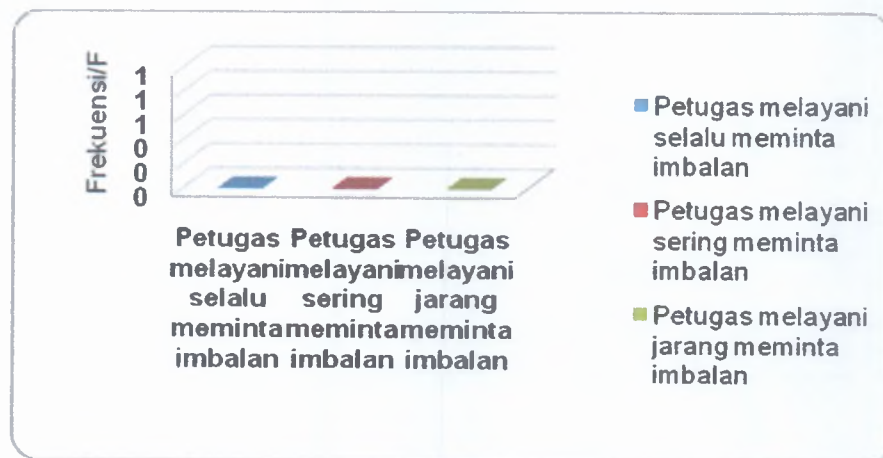
3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar "4.00" berada pada interval skor "3,5324 s/d 4" kategori "A". Dengan demikian layanan pengadilan, pada "Indikator Penyalahgunaan Jabatan" berada pada kategori "Bersih dari korupsi".

Tabel 4
Indeks pada Penyalahgunaan Jabatan

| No | Jawaban | Skor | Frekuensi | |
|----|---|---------------|-----------|------------|
| | | | F | % |
| 1. | Petugas melayani selalu meminta imbalan | 1 | 0 | 0,00 |
| 2. | Petugas melayani sering meminta imbalan | 2 | 0 | 0,00 |
| 3. | Petugas melayani jarang meminta imbalan | 3 | 0 | 0,00 |
| 4. | Petugas melayani tanpa meminta imbalan | 4 | 37 | 100,00 |
| | | Jumlah | 37 | 100 |

Gambar 7
Indeks pada Penyalahgunaan Jabatan



3.2.3. Indikator Transaksi Rahasia

Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar "4,00" berada pada interval skor "3,5324 s/d 4" kategori "A". Dengan demikian layanan pengadilan, pada "Indikator Transaksi Rahasia" berada pada kategori "Bersih dari korupsi".

Tabel 5
Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia

| No | Jawaban | Skor | Frekuensi | |
|---------------|-----------|------|-----------|------------|
| | | | F | % |
| 1. | Selalu | 1 | 0 | 0,00 |
| 2. | Sering | 2 | 0 | 0,00 |
| 3. | Jarang | 3 | 0 | 0,00 |
| 4. | Tidak Ada | 4 | 37 | 100,00 |
| Jumlah | | | 37 | 100 |

Gambar 8
Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia



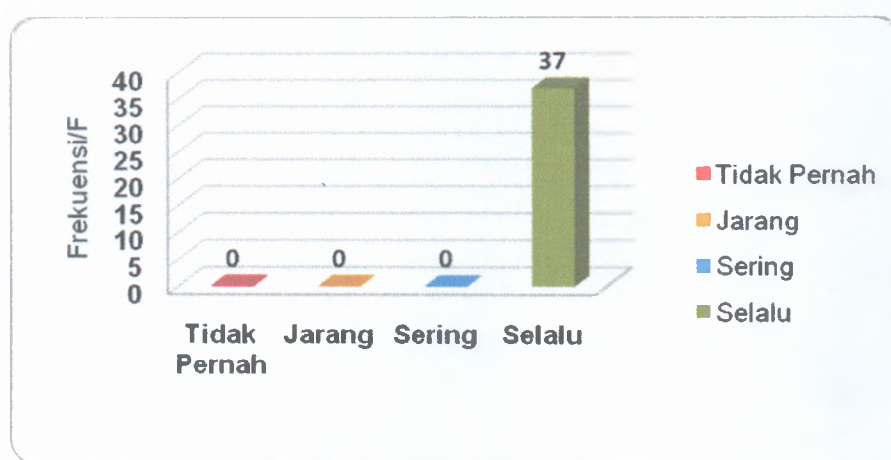
3.2.4. Indikator Informasi Tarif/Biaya

Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar "4,00" berada pada interval skor "3,5324 s/d 4" kategori "A". Dengan demikian layanan pengadilan, pada "Indikator Informasi Tarif/Biaya" berada pada kategori "Bersih dari korupsi".

Tabel 6
Indeks pada Indikator Informasi Tarif Biaya

| No | Jawaban | Skor | Frekuensi | |
|--------|--------------|------|-----------|--------|
| | | | F | % |
| 1. | Tidak Pernah | 1 | 0 | 0,00 |
| 2. | Jarang | 2 | 0 | 0,00 |
| 3. | Sering | 3 | 0 | 0,00 |
| 4. | Selalu | 4 | 37 | 100,00 |
| Jumlah | | | 37 | 100 |

Gambar 9
Indeks pada Indikator Informasi Tarif/Biaya



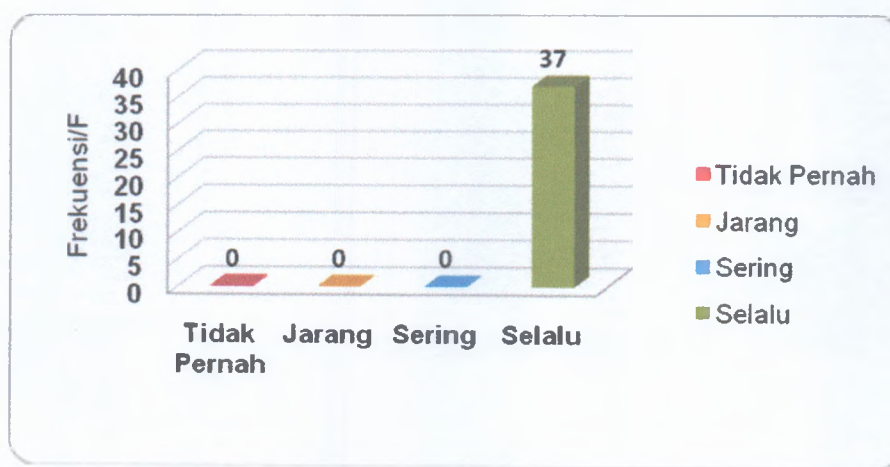
3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar "4,00" berada pada interval skor "3,5324 s/d 4" kategori "A". Dengan demikian layanan pengadilan, pada "Indikator Biaya Tambahan" berada pada kategori "Bersih dari korupsi".

Tabel 7
Indeks pada Indikator Biaya Tambahan

| No | Jawaban | Skor | Frekuensi | |
|---------------|--------------|------|-----------|------------|
| | | | F | % |
| 1. | Tidak Pernah | 1 | 0 | 0,00 |
| 2. | Jarang | 2 | 0 | 0,00 |
| 3. | Sering | 3 | 1 | 0,88 |
| 4. | Selalu | 4 | 37 | 100,00 |
| Jumlah | | | 37 | 100 |

Gambar 10
Tabel Indeks pada Indikator Biaya Tambahan



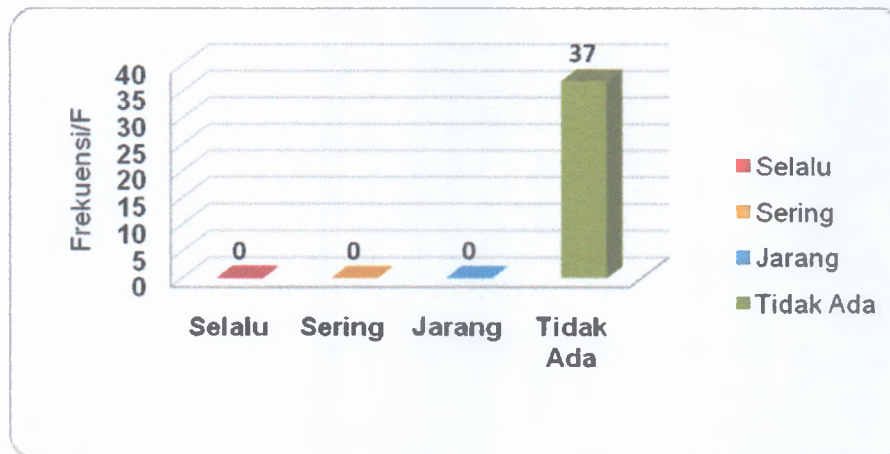
3.2.6. Indikator Hadiah

Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar "4,00" berada pada interval skor "3,5324 s/d 4" kategori "A". Dengan demikian layanan pengadilan, pada "Indikator Hadiah" berada pada kategori "Bersih dari korupsi".

Tabel 8
Indeks pada Indikator Hadiah

| No | Jawaban | Skor | Frekuensi | |
|---------------|-----------|------|-----------|------------|
| | | | F | % |
| 1. | Selalu | 1 | 0 | 0,00 |
| 2. | Sering | 2 | 0 | 0,00 |
| 3. | Jarang | 3 | 0 | 0,00 |
| 4. | Tidak Ada | 4 | 37 | 100,00 |
| Jumlah | | | 37 | 100 |

Gambar 11
Indeks pada Indikator Hadiah



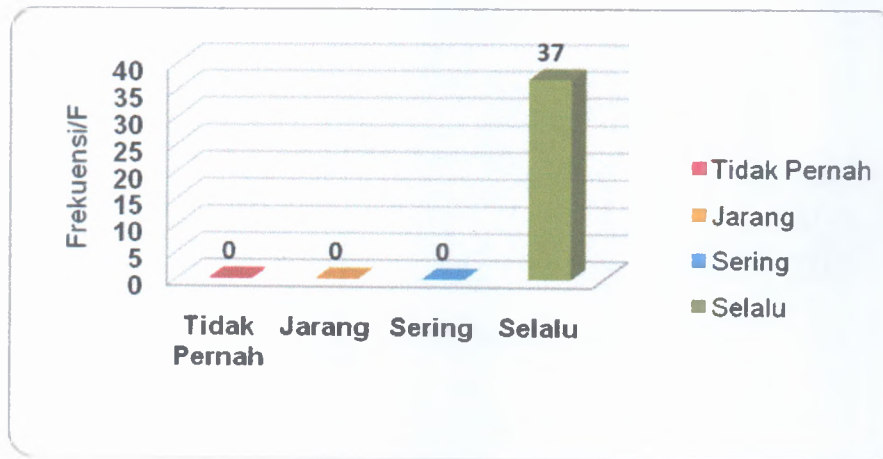
3.2.7. Indikator Bukti Transaksi Pembayaran

Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar "4,00" berada pada interval skor "3,5324 s/d 4" kategori "A". Dengan demikian layanan pengadilan, pada "Indikator Bukti Transaksi Pembayaran" berada pada kategori "Bersih dari korupsi".

Tabel 9
Indeks pada Indikator Bukti Transaksi Pembayaran

| No | Jawaban | Skor | Frekuensi | |
|---------------|--------------|------|-----------|------------|
| | | | F | % |
| 1. | Tidak Pernah | 1 | 0 | 0,00 |
| 2. | Jarang | 2 | 0 | 0,00 |
| 3. | Sering | 3 | 0 | 0,00 |
| 4. | Selalu | 4 | 37 | 100,00 |
| Jumlah | | | 37 | 100 |

Gambar 12
Indeks pada Indikator Bukti Transaksi Pembayaran



3.2.8. Indikator Percaloan

Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar "4,00" berada pada interval skor "3,5324 s/d 4" kategori "A". Dengan demikian layanan pengadilan, pada "Indikator Percaloan" berada pada kategori "Bersih dari korupsi".

Tabel 10
Indeks pada Indikator Percaloan

| No | Jawaban | Skor | Frekuensi | |
|---------------|-----------|------|-----------|------------|
| | | | F | % |
| 1. | Selalu | 1 | 0 | 0,00 |
| 2. | Sering | 2 | 0 | 0,00 |
| 3. | Jarang | 3 | 0 | 0,00 |
| 4. | Tidak Ada | 4 | 37 | 100,00 |
| Jumlah | | | 37 | 100 |

Gambar 13
Indeks pada Indikator Percaloan



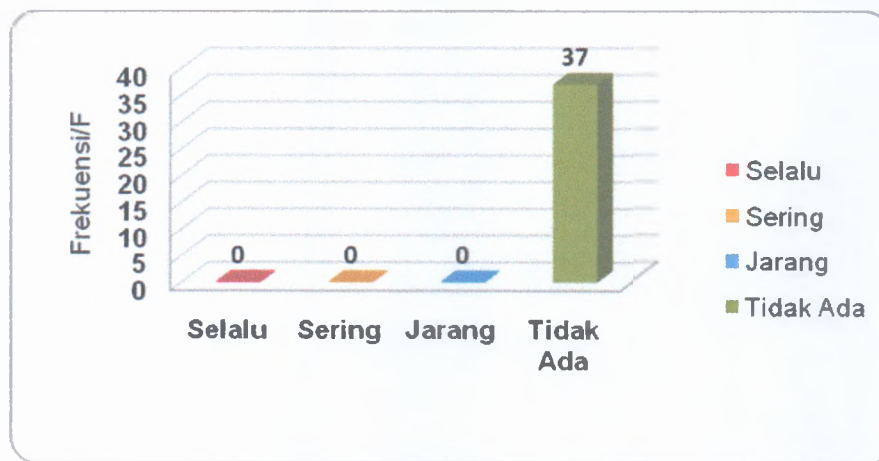
3.2.9. Indikator Praktek KKN

Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar “4.00” berada pada interval skor “3,5324 s/d 4” Kategori “A”. Dengan demikian layanan pengadilan, pada “Indikator Percaloan” berada pada kategori “Bersih dari korupsi”.

Tabel 11
Indeks pada Indikator Praktek KKN

| No | Jawaban | Skor | Frekuensi | |
|---------------|-----------|------|-----------|------------|
| | | | F | % |
| 1. | Selalu | 1 | 0 | 0,00 |
| 2. | Sering | 2 | 0 | 0,00 |
| 3. | Jarang | 3 | 0 | 0,00 |
| 4. | Tidak Ada | 4 | 37 | 100,00 |
| Jumlah | | | 37 | 100 |

Gambar 14
Indeks pada Indikator Praktek KKN



3.2.10. Indikator Mengurus Perkara

Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar "4,00" berada pada interval skor "3,5324 s/d 4" kategori "A". Dengan demikian layanan pengadilan, pada "Indikator Mengurus Perkara" berada pada kategori "Bersih dari korupsi".

Tabel 12
Indeks pada Indikator Mengurus Perkara

| No | Jawaban | Skor | Frekuensi | |
|----|-----------|---------------|-----------|------------|
| | | | F | % |
| 1. | Selalu | 1 | 0 | 0,00 |
| 2. | Sering | 2 | 0 | 0,00 |
| 3. | Jarang | 3 | 0 | 0,00 |
| 4. | Tidak Ada | 4 | 37 | 100,00 |
| | | Jumlah | 37 | 100 |

Gambar 15
Indeks pada Indikator Mengurus Perkara



Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Tabel 13

Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kota Agung

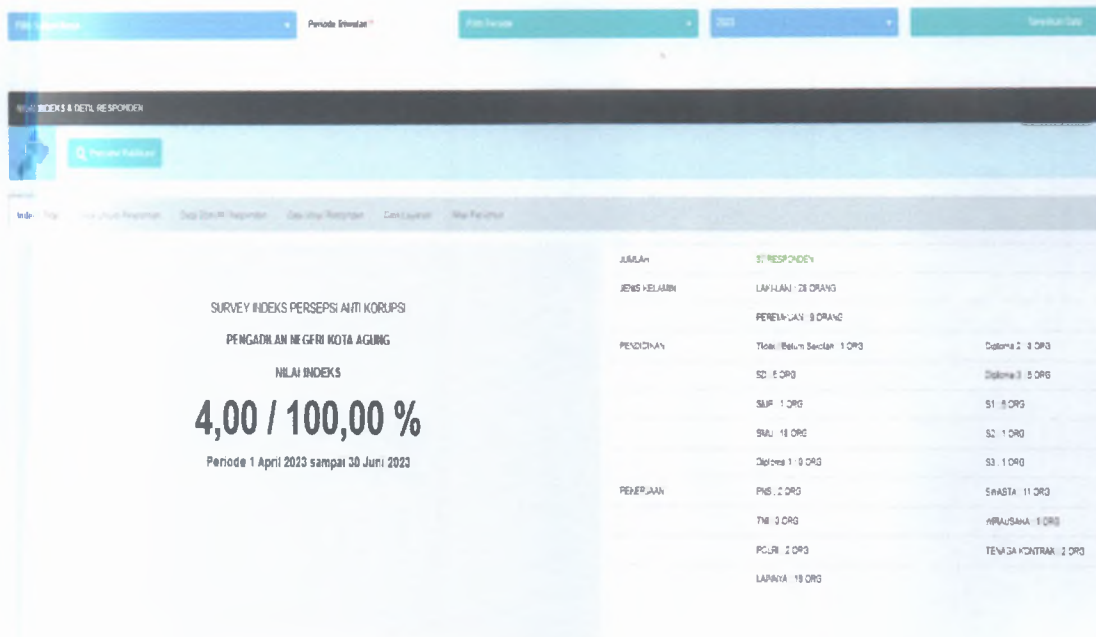
| No. Resp. | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Nilai / Unsur | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------|
| NRR / Unsur | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| NRR / Tertimbang | 0,40 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| IKM Unit Pelayanan | | | | | | | | | | | | 100,00 |
| Status Kepuasan | | | | | | | | | | | | A (Bersih dari korupsi) |

Tabel 14
Nilai Rata-Rata Indikator Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

| No | UNSUR PELAYANAN | NILAI RATA-RATA |
|-----|----------------------------|-----------------|
| U1 | Manipulasi Peraturan | 4,00 |
| U2 | Penyalahgunaan Jabatan | 4,00 |
| U3 | Transaksi Rahasia | 4,00 |
| U4 | Informasi Tarif/Biaya | 4,00 |
| U5 | Biaya Tambahan | 4,00 |
| U6 | Hadiah | 4,00 |
| U7 | Bukti Transaksi Pembayaran | 4,00 |
| U8 | Percaloan | 4,00 |
| U9 | Praktek KKN | 4,00 |
| U10 | Mengurus Perkara | 4,00 |

Gambar 16
Nilai Publikasi Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diperoleh nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi terhadap Pengadilan Negeri Kota Agung secara keseluruhan adalah **4,00** artinya nilai rata-rata dari seluruh unsur penilaian berada pada kategori **Bersih Dari Korupsi** dengan mutu kinerja **A**;
2. Berdasarkan urutan besaran IPAK hasil dari penilaian masyarakat, terdapat 3 unsur yang tertinggi yaitu:

| No | Unsur | Nilai |
|----|---|-------|
| 1 | Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? | 140 |
| 2 | Apakah dalam menerima layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyediaan jabatan dan petugas yang memiliki keahlian khusus? | 140 |
| 3 | Pemahaman hukum dan wawasan hukum Pengadilan yang akan membantu dalam penyelesaian sengketa perkara? | 140 |

3. Berdasarkan urutan besaran IPAK hasil dari penilaian masyarakat, terdapat 3 unsur yang terendah yaitu:

| No | Unsur | Nilai |
|----|---|-------|
| 1 | Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? | 140 |
| 2 | Apakah dalam menerima layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyediaan jabatan dan petugas yang memiliki keahlian khusus? | 140 |
| 3 | Pemahaman hukum dan wawasan hukum Pengadilan yang akan membantu dalam penyelesaian sengketa perkara? | 140 |

4. Semua unsur penilaian diapresiasi secara baik oleh masyarakat;

B. Rekomendasi

1. Semua unsur atau unit pelayanan di Pengadilan Negeri Kota Agung perlu dipertahankan dan ditingkatkan kinerjanya, agar unsur yang telah sangat baik dapat dipertahankan atau meningkatkan kinerjanya, sementara unsur

yang masih rendah nilainya dapat ditingkatkan dalam survei mendatang menjadi lebih baik, begitu juga unsur-unsur penilaian yang berada di nilai tengah dapat lebih ditingkatkan lagi kinerjanya.

2. Hasil survei untuk mengukur Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini dapat dijadikan dasar dan bahan melakukan evaluasi kinerja oleh semua pegawai di Pengadilan Negeri Kota Agung, mulai dari pimpinan, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita, tenaga honorer, hingga petugas kebersihan dan pada akhirnya juga bermanfaat untuk mengambil tindakan dan kebijakan yang berorientasi kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
3. Survei kepuasan masyarakat ini hendaknya dilakukan secara periodik satu tahun sekali dengan jumlah responden yang semakin banyak, agar lebih representatif mewakili penilaian masyarakat dan juga dapat mengukur perkembangan kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung.

LAMPIRAN

ASUPER (SPAK SIM HARJANI) | x +

Not secure | esurvey.badikum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol_lok

Apps | Gmail | MA | Badikum | SPP PI KOT | SPP MA | Top | MIS

Survei Persepsi Ahli Kompusi | SPAK

Form Jukesron untuk survei bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integrasi dalam pelayanan Pengadilan.

Data Re... | Layanan | Form Ku... | Keasah &...

1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?

Tidak Sesuai Prosedur
 Jarang Sesuai Prosedur
 Sering Sesuai Prosedur
 Selalu Sesuai Prosedur

2. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?

Petugas melayani selalu meminta imbalan
 Petugas melayani sering meminta imbalan
 Petugas melayani Jarang meminta imbalan
 Petugas melayani tanpa meminta imbalan

3. Peranakah dihubungkan oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara?

Selalu
 Sering
 Jarang
 Tidak Ada

4. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan?

Tidak Pernah
 Jarang
 Sering
 Selalu

5. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?

ASUPER (SPAK SIM HARJANI) | x +

Not secure | esurvey.badikum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol_lok

Apps | Gmail | MA | Badikum | SPP PI KOT | SPP MA | Top | MIS

Survei Persepsi Ahli Kompusi | SPAK

5. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?

Tidak Pernah
 Jarang
 Sering
 Selalu

6. Apakah memberikan tanda terima atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta)?

Selalu
 Sering
 Jarang
 Tidak Ada

7. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan?

Tidak Pernah
 Jarang
 Sering
 Selalu

8. Apakah pernah mengetahui ada praktik pemecatan dalam pengurusan layanan di Pengadilan?

Selalu
 Sering
 Jarang
 Tidak Ada

9. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktik KKN di Pengadilan?

Selalu
 Sering
 Jarang
 Tidak Ada

10. Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan?

Selalu
 Sering
 Jarang
 Tidak Ada

Kembali | Selanjutnya

LINK APLIKASI KUISIONER IPAK

esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/477306

Screenshoot Aplikasi Kuisioner IPAK:

The screenshot displays a web browser window with the URL esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol_ipak. The page title is "APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK". Below the title, there is a header for "Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK" and a subtitle: "Form kuisisioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan".

The main content area is titled "Data Responden SPAK" and contains several form fields:

- Nama**:
- Umur / Jenis Kelamin**:
- Nomor HP**: (with a note: "Contoh: 81211112222")
- Domisili**:
- Pendidikan**:
- Pekerjaan**:

At the bottom right of the form, there are two buttons: "Kembali" and "Selanjutnya".